



SEJARAH PERKEMBANGAN TANJUNGPINANG SEBAGAI MARKAS MILITER DI DAERAH PERBATASAN

**(HISTORICAL DEVELOPMENT OF TANJUNGPINANG AS A
MILITARY HEADQUARTER IN THE BORDER AREA)**

Dedi Arman¹

¹ Pusat Riset Kewilayahan-BRIN, Jakarta Selatan, Indonesia

E-mail: dedi023@brin.go.id

Diterima: Mei 2023

Direvisi: Juni 2023

Disetujui: Juni 2023

DOI:

Abstrak: Tulisan ini mengkaji perkembangan Tanjungpinang sebagai markas militer di daerah perbatasan. Kajian dilakukan menggunakan metode penelitian sejarah dan dalam pengumpulan data dilakukan studi kepustakaan. Dari kajian diketahui, pasca kemerdekaan Tanjungpinang sebagai ibukota Kabupaten Kepulauan Riau memiliki peran penting sebagai markas militer militer. Kepulauan Riau satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau yang tidak dikuasai oleh pemberontak ketika meletus pemberontakan di Sumatra Barat yang dilakukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) tahun 1958. Pemerintah pusat menjadikan Tanjungpinang menjadi markas militer untuk menutup pemberontakan PRRI setelah menguasai Lapangan Udara Kijang. Sejak tahun 1950-an, Tanjungpinang juga dijadikan basis Angkatan Laut Republik Indonesia. Dimulai pembentukan Komando Daerah Maritim Riau (KDMR) yang nantinya berubah nama jadi Komando Daerah Maritim (Kodamar), cikal bakal Pangkalan Utama Angkatan Laut RI (Lantamal) IV Tanjungpinang. Pentingnya posisi Tanjungpinang dalam bidang militer di wilayah perbatasan terlihat dengan kehadiran sejumlah institusi militer pasca terbentuknya Provinsi Kepri dengan Tanjungpinang sebagai ibukota. Diawali pembentukan Komando Resort Militer (Korem) 033 Wira Pratama tahun 2006, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I tahun 2020 dan Tanjungpinang jadi markas Komando Armada I tanggal 5 Desember 2022.

Kata Kunci: *Tanjungpinang, markas militer, daerah perbatasan*

Abstract: This paper examines the development of Tanjungpinang as a military base in the border area. The study was carried out using historical research methods and in data collection a literature study was carried out. From the study it is known that post-independence Tanjungpinang as the capital of the Riau Archipelago Regency has an important role as a military military headquarters. Riau Archipelago was the only district in Riau Province that was not controlled by rebels when a rebellion broke out in West Sumatra carried out by the Revolutionary Government of the Republic of Indonesia (PRRI) in 1958. The central government made Tanjungpinang a military base to quell the PRRI rebellion after controlling the Kijang Airfield. Since the 1950s, Tanjungpinang has also been used as the base for the Indonesian Navy. Starting with the establishment of the Riau Maritime Regional Command (KDMR) which later changed its name to the Maritime Regional Command (Kodamar), the forerunner of the Indonesian Navy Main Base (Lantamal) IV Tanjungpinang. The importance of Tanjungpinang's position in the military field in the border region can be seen from the presence of a number of military institutions after the formation of the Riau Islands Province with Tanjungpinang as the capital. Beginning with the formation of the Military Resort Command (Korem) 033 Wira Pratama in 2006, the Joint Regional Defense Command (Kogabwilhan) I in 2020 and Tanjungpinang became the headquarters of the Fleet Command I on 5 December 2022.

Keywords: *Tanjungpinang, military headquarters, border area*





I. PENDAHULUAN

Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 dengan ibukota Tanjungpinang. Secara resmi jalannya pemerintahan dimulai dengan pelantikan Penjabat Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah tanggal 1 Juli 2004 di Gedung Daerah Tanjungpinang. Pelantikan Penjabat Gubernur Kepri dilakukan Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno. Peresmian Provinsi Kepri dan pelantikan Penjabat Gubernur Kepri dihadiri juga oleh Menteri Koordinator Ekuin, Dorodjatun Kuntjorojakti, Gubernur Riau H.M Rusli Zainal, Wagub Riau Wan Abubakar, sejumlah Anggota DPR RI dan para walikota dan bupati se-Riau dan Kepulauan Riau. (Malik, 2022).

Saat Provinsi Kepri terbentuk, instansi militer yang ada di Kota Tanjungpinang ada tiga, yakni Lantamal IV Tanjungpinang, yang komandannya saat itu berpangkat kolonel, Komando Distrik Militer (Kodim) Bintan yang membawahi Kota Tanjungpinang, Kabupaten Kepri (berubah nama jadi Bintan) dan Kabupaten Lingga. Komandannya pangat letnan kolonel. Satu lagi instansi militer yang ada adalah Pangkalan Udara (Lanud) Tanjungpinang yang komandannya berpangkat letnan kolonel.

Dalam perkembangannya, Tanjungpinang menduduki posisi penting sebagai markas militer di daerah perbatasan. Hal ini tidak terlepas posisi Tanjungpinang yang sangat strategis sebagai salahsatu daerah perbatasan. Termasuk dekat dengan Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara dan juga dekat dengan Selat Malaka, kawasan jadi fokus perhatian pemerintah Indonesia dalam bidang pertahanan. Tidak heran pemerintah Indonesia menjadikan Tanjungpinang sebagai markas militer dengan cara menjadikan Tanjungpinang sebagai pusat markas militer.

Ancaman regional yang sangat diwaspadai adalah konflik di Laut Natuna Utara. Kawasan ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa dan menjadi alasan utama bagi negara yang bersengketa saling bersaing untuk menguasainya. Fenomena tersebut tentu mempengaruhi stabilitas nasional karena berdekatan dengan Kepulauan Natuna yang bisa jadi sumber terjadinya perbenturan antara Indonesia dengan China maupun negara tetangga yang bersengketa (Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam). Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I yang berpusat di Tanjungpinang menjadi langkah strategis. (Ulfah, Laeli Maria, 2021).

Perpindahan Kogabwilhan I dari Jakarta ke Tanjungpinang dianggap strategis karena membawahi wilayah kerjanya membawahi Perairan Sabang, Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Natuna Utara, Alur Laut Kepulauan Indonesia I yang melalui Selat Karimata, Selat Sunda, Laut Jawa, dan Samudera Hindia. Berdasarkan Keputusan Kasal Nomor Kep/2794/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 tentang Relokasi Markas Komando di lingkungan Komando Armada I maka Koarmada I menempati lokasi baru di Tanjungpinang dan secara resmi Koarmada I Tanjungpinang diresmikan pada 5 Desember 2022. Momen peresmian markas Koarmada I dilaksanakan Upacara Hari Armada di Mako Koarmada I yang dipimpin Wakasal Laksdy TNI Ahmad Heri Purwono selaku inspektur upacara. (*Sejarah Koarmada I*, diakses 4 Maret 2023.)

Di Tanjungpinang selain markas Kogabwilhan I dan Koarmada I juga menjadi markas Komando Resort Militer (Korem) Wira Pratama sejak tahun 2006. Dalam perkembangannya, komandan Korem Wira Pratama dijabat perwira bintang satu. Korem Wira Pratama





membawahi Kodim Bintan, Kodim Batam, Kodim Natuna, dan Kodim Karimun. Selain membawahi empat Kodim, juga membawahi sejumlah Batalyon Infanteri yang tersebar di Kepri.

Menarik mengkaji perkembangan Tanjungpinang sebagai markas militer di daerah perbatasan. Sejak tahun 1950-1960-an, Tanjungpinang menjadi daerah penting sebagai basis pertahanan dalam menumpaskan pemberontakan PRRI yang berpusat di Padang, Sumatra Barat. Tanjungpinang juga jadi markas Angkatan Laut RI sejak era Komando Maritim Daerah Riau (KDMR) yang nantinya jadi cikal bakal Lantamal IV Tanjungpinang. Belakangan peran Tanjungpinang makin penting setelah kebijakan pemerintah Indonesia menjadikan Tanjungpinang sebagai markas Kogabwilhan I dan Koarmada I. Tanjungpinang menjadi kota utama di Indonesia bagian barat sebagai ujung tombak pertahanan militer.

II. METODE

Dalam membahas Perkembangan Tanjungpinang sebagai basis militer Indonesia di daerah perbatasan, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Ada lima tahapan dalam metode sejarah, dimulai penentuan topik penelitian, menggali sumber, verifikasi berupa kritik sumber dan keabsahan sumbe, interpretasi (pembahasan sintesis) dan penulisan. (Kuntowijoyo, 2013). Dalam menggali sumber menggunakan studi kepustakaan. Studi pustaka atau riset Pustaka diartikan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data, membaca, mencatat dan mengolahan bahan penelitian. (Zed, 2014).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

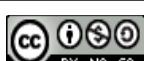
Tanjungpinang sebagai Basis Pertahanan Menumpas PRRI

Akhir tahun 1950-an terjadi pergolakan sejumlah daerah. Hal ini

bersumber ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat yang dinilai tidak memperhatikan kondisi daerah-daerah yang terbalut kemiskinan. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) diproklamirkan oleh Dewan Banteng dibawah pimpinan Letkol Ahmad Husein tanggal 15 Februari 1958 di Padang, Sumatra Barat. Munculnya PRRI mendapat dukungan di sejumlah daerah. Ada Dewan Gajah di Sumatra Utara, Dewan Manguni di Sulawesi Utara dan Dewan Garuda di Sumatra Selatan.

Seluruh kabupaten/kota di Sumatra Barat dan Riau dikuasai oleh Dewan Banteng kecuali Kabupaten Kepulauan Riau. Kondisi ini dapat dilihat dalam Laporan M Zain Busrie kepada Presiden RI tanggal 13 Februari 1958 tentang Retjana Dewan Banteng untuk merebut Kabupaten Kepulauan Riau-Tanjungpinang. Dalam laporan itu dijelaskan, Kepulauan Riau satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau yang belum dikuasai Dewan Banteng. Daerah Kepri sulit ditaklukan karena kondisi bentangan alamnya yang terdiri dari banyak pulau. Kepri tetap tunduk kepada pemerintah pusat dan tidak takluk pada Dewan Banteng. Kepri sangat cocok dijadikan markas militer guna melumpuhkan pemberontakan PRRI di Sumatra Barat. Dari Tanjungpinang sangat mudah untuk memblokade kapal yang menuju ke dan dari Singapura. Dari Tanjungpinang mudah menyalurkan bantuan langsung ke daerah Riau daratan. (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2015).

Dewan Banteng telah melakukan sejumlah langkah dalam merebut Tanjungpinang yang dianggap sangat strategis dari segi militer dan ekonomi. Ada tiga langkah yang dilakukan Dewan Banteng dalam merebut Tanjungpinang. Pertama, menginstruksikan Bupati Kepri, Rakana Daljan untuk melakukan pendekatan kepada Overate Angkatan Laut Republik Indonesia, Letkol Simanjuntak.





Kedua, mengirim tentara dari Sumbar sebanyak 300 orang yang disusupkan sebagai petani yang tinggal di sepanjang antara Tanjungpinang dan Kijang. Ketiga, mengirim orang-orang untuk menyamar sebagai pedagang di Tanjungpinang, Indragiri dan Pekanbaru.

PRRI berupaya untuk merebut kekuasaan sipil di Tanjungpinang dan Kepulauan Riau dari Residen Riau, Sis Tjakraningrat. Selain itu juga akan merebut Lapangan Udara Kijang (kini menjadi Bandara Raja Haji Fisabilillah) di Tanjungpinang. Pemerintah pusat bergerak lebih cepat dari PRRI dengan menguasai Lapangan Udara Kijang. Pemerintah pusat mengerahkan pesawat pembom tempur B-25 Mitchel buatan *Douglas Aircraft Corporation* yang berasal dari Amerika Serikat. Dari Lanud Kijang di Tanjungpinang, pasukan dari Angkatan Utara berhasil menguasai Lapangan Udara Simpang Tiga di Pekanbaru, menyerang markas PRRI di daerah Lubuk Jambi dan Muara Mahat di Riau. Dari Riau, serangan dilanjutkan menaklukkan Lapangan Udara Padang. Pesawat terbang yang dimiliki AURI juga mengejar sisa-sisa pasukan PRRI yang melarikan diri ke arah Tapanuli. ([Menengok Koleksi Pesawat Tempur Museum Satria Mandala-Wartakotalive.com \(tribunnews.com\)](#)).

Pasca berhasil memadamkan pemberontakan disejumlah daerah, Presiden Sukarno kemudian turun ke daerah-daerah, salahsatunya ke Tanjungpinang. Dalam rapat raksasa yang dihadiri puluhan ribu masyarakat Tanjungpinang tanggal 6 September 1959, Sukarno berpidato berapi-api. Dalam pidatonya Sukarno bercerita, sebelum ke Tanjungpinang, ia datang dari Aceh. Masyarakat Aceh katanya setiap pada NKRI dan Proklamasi meski mendapat ancaman dan tekanan. Sukarno menjelaskan ada dua cita-cita revolusi, yaitu cita-cita politik dan cira-cita sosial.

Dalam bidang politik, cita-cita revolusi adalah membangun negara kesatuan yang besar. Bukan dua atau tiga negara. Cita-cita besar ini belum tercapai karena Irian Barat masih dijajah Belanda. (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2015).



Presiden Soekarno memeriksa barisan kehormatan setibanya di lapangan terbang di Tanjungpinang, 6 September 1959.

Gambar 1. Presiden Sukarno kunjungan kerja ke Tanjungpinang

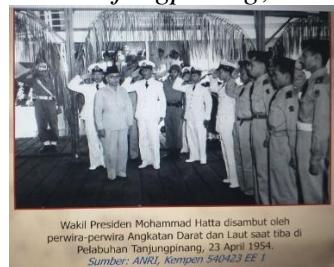
Sumber: ANRI, Citra Tanjungpinang dalam Arsip, 2015

Tanjungpinang jadi Basis Angkatan Laut

Provinsi Riau terbentuk tahun 1958 dengan ibukota di Tanjungpinang. Wilayahnya membawahi daerah Riau Daratan dan daerah Kepulauan Riau yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Sejak tahun 1958, Tanjungpinang pernah menjadi pangkalan angkatan laut pemerintah Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, ada beberapa daerah yang diprioritaskan sebagai pangkalan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) atau Komando Daerah Angkatan Laut, yaitu Riau, Makassar, dan Ambon. Komando Daerah Maritim (KDMR) Riau diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Pertahanan No. MP/A/170/54 tanggal 31 Maret 1954, dengan memperhatikan Keputusan Menteri Pertahanan No. 34/MP./50 tanggal 4 Februari 1950 versi. Sebelumnya di Kepri terdapat Kabupaten Pengawasan Laut dan Pesisir Tanjung Uban (DPLPTU) berdasarkan SK Kasal No. G/4/6/13 tanggal 23 Desember 1950. Wilayah tanggung jawab dan penguasaan



DPLPTU meliputi perairan Kepulauan Riau, khususnya di sekitar Tanjung Uban yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia. (*Sejarah Lantamal IV Tanjungpinang, 2023*).



Gambar 2. Wakil Presiden M Hatta berkunjung ke Tanjungpinang
Sumber: ANRI, 2015

KDMR yang dibentuk berkedudukan langsung dan melapor kepada Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal). Posko KDMR di Tanjungpinang memiliki yurisdiksi atas wilayah provinsi Sumatera Tengah, pantai timur, termasuk wilayah administrasi Kepulauan Riau pulau Bintan, Karimun, Kundur, Lingga, Singkep, Anambas, Natuna dan Tambelan. Selain itu, juga mencakup wilayah Perairan Bengkalis. (Arman, 2022). Berdasarkan Men/Casal Order No. A4/6/60 tanggal 18 Oktober 1960, nama KDM ALRI diubah menjadi Komando Daerah Maritim (Kodamar). Sejarah praktek KDMR ini menjadi Kodamar II Riau. Mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan strategis, serta menyesuaikan dengan strategi peperangan laut, mengingat Badan Pertahanan dan Keamanan telah dipindahkan ke Kowilhan sebagai markas operasional pertahanan yang merupakan operasi bersama., nama Kodamar diubah menjadi Komando Teritorial Angkatan Laut (Kodaeral). Kepindahan ke Kodaeral berdasarkan Surat Keputusan No. Kep B/429/69 Tahun 1969 oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Tentara Nasional dan sejak Januari 1970 Kodam Riau menjadi Komando Daerah Militer 2 UU No. 20 Tahun 1982, dikeluarkan Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata

No. Kop/09/P/III/1984 tentang Misi Utama TNI AL, nama Kodaeral diubah menjadi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal).

Sebelum bernama Lantamal IV Tanjungpinang, Namanya Lantamal VII. Namun sejak tahun 2006 berubah jadi Lantamal IV Tanjungpinang dan membawahi lima pangkalan Angkatan laut (Lanal) yakni Lanal Dabo Singkep, Lanal Batam, Lanal Karimun, dan Lanal Tarempa. Komandan Lantamal IV awalnya berpangkat kolonel namun sejak tahun 2006, komandannya bintang 1. Lantamal IV juga membawahi dua pangkalan udara Angkatan laut (Lanudal) Tanjungpinang dan Lanudal Tarempa di Anambas. Sejak 5 Desember 2022, markas Lantamal IV Tanjungpinang yang beralamat di Jl Yos Sudarso Nomor 1 Tanjungpinang pindah ke Batam. Hal ini terkait pindahnya Mako Koarmada I ke Tanjungpinang. Mako Koarmada I beroperasi di bekas kantor Lantamal IV Tanjungpinang. Bersamaan dengan itu, markas Lantamal IV Tanjungpinang dipindahkan ke bekas markas Lanal Batam di Tanjung Sengkuang. Lantamal IV Tanjungpinang berubah nama menjadi Lantamal IV Bintan. Kebijakan lain yang diambil markas Angkatan Laut RI adalah memindahkan Gugus Keamanan Laut (Guskamla) di Batam ke Sabang (Aceh). Guskamla dipimpin perwira bintang I.



Gambar 3. Mako Koarmada I di Tanjungpinang
Sumber: kogabwilhan1-tni.mil.id)



Bertabur Bintang di Tanjungpinang

Saat pemerintahan Provinsi Kepri mulai berjalan 1 Juli 2004, di Tanjungpinang baru ada tiga institusi militer. Lantamal VII Tanjungpinang (berubah jadi Lantamal IV) yang dipimpin seorang kolonel, Kodim 0315 Bintan dipimpin letnan kolonel dan Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Tanjungpinang yang komandannya juga berpangkat letnan kolonel. Setahun berselang dibentuk Komando Resor Militer (Korem) 033 Wira Pratama. Pendirianya berdasarkan Skep Kasad Nomor Kep/67/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Pengesahan Pendirian Korem 033/Wira Pratama. Kemudian keluaran Sprint Pangdam I/BB menyusul:Sprint/1132/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 menyetujui pendirian Korem 033/Wira Pratama di Sei Timun Kota Tanjung Pinang pada tanggal 19 September 2006. Komando pertamanya semula berpangkat kolonel, kemudian naik pangkat. kelas bintang satu.

Selain Angkatan Darat dan Angkatan Laut, Angkatan Udara juga menjadikan Tanjungpinang sebagai pangkalan pertahanan sejak tahun 1950-an. Tanjungpinang saat ini menjadi markas Pangkalan Udara Raja Haji Fisabilillah (RAF) yang dipimpin oleh seorang kolonel. Keberadaan pangkalan udara RAF sudah ada sejak lama. Pangkalan udara RAF dibentuk berdasarkan Surat Kasau Nomor 179 tanggal 16 Juli 1958 tentang pembentukan Detasemen Angkatan Udara Tanjungpinang. Dinas ini bertugas mengawasi keamanan kawasan Tanjungpinang dan lingkungannya. Detasemen Angkatan Udara Tanjungpinang terletak di kawasan Bandara Kijang. Adnan Kapau Gani, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, meresmikan Bandara Kijang pada tahun 1953. Pada awalnya, Bandara Kijang merupakan landasan pacu beraspal sederhana, dan layanan penerbangan lainnya masih sangat terbatas.

Tercatat, pesawat yang pertama kali mendarat di Bandara Kijang adalah pesawat Garuda (GIA) tipe Heron. Komandan Lanud Tanjungpinang semula berpangkat kapten. (<https://tni-au.mil.id/portfolio/lanud-raja-fisabilillah/>)

Pemerintah RI memandang ancaman keamanan di daerah perbatasan makin tinggi. Salahsatu Langkah yang diambil pemerintah adalah pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Kogabwilhan dibentuk berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tugas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Ada tiga Kogabwilhan dan salah satunya adalah Kogabwilhan I yang berkedudukan di Tanjungpinang dan memiliki mandat penting untuk mendukung sistem pertahanan negara. Selain itu, wilayah kerja Kogabwilhan I bertanggung jawab atas perairan Natuna yang terkena dampak konflik di Laut Natuna Utara. (Mardamsyah, A., Wiranto, S., Sitorus, H., Hipdizah, H., Saptono, D., & Simatupang, 2022).



Gambar 4. Mako sementara Kogabwilhan I
Sumber: kogabwilhan1-tni.mil.id

Selain potensi konflik di Laut Natuna Utara, isu keamanan lain yang selalu menjadi ciri khas wilayah perbatasan Kepulauan Riau dengan Singapura dan Malaysia adalah batas wilayah, kasus perdagangan manusia dan juga penyelewengan. Kehadiran beberapa



organisasi militer baru di Tanjungpinang memperkuat kekuatan militer Indonesia di wilayah perbatasan. Hal itu karena untuk memastikan kehadiran Kogabwilhan dan Koarmada I, serta penambahan personel TNI dan alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

Di sisi lain, dengan hadirnya banyak instansi militer dan bertambahnya personel TNI di Tanjungpinang, ada hal lain yang dinanti yaitu isu soliditas atau kekompakkan TNI. Insiden di wilayah perbatasan lain seperti Papua diwarnai seringnya bentrokan antar kesatuan. Kadang antara TNI dengan Polri. Hal ini harus jadi perhatian karena Tanjungpinang wilayahnya kecil, potensi gesekan antara kesatuan mudah terjadi.

Poin penting lainnya, kehadiran Kogabwilhan, Koarmada I dan kesatuan militer lainnya di Tanjungpinang pasti akan mempengaruhi jumlah personel TNI di Tanjungpinang. Ribuan personil TNI yang tinggal di Tanjungpinang pasti membutuhkan perumahan dengan segala fasilitasnya seperti air bersih. Padahal, Tanjungpinang sudah lama kesulitan dalam menyediakan air bersih yang layak bagi warganya. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan

Tanjungpinang, ibukota Provinsi Kepulauan Riau saat ini menempati posisi penting dalam bidang militer di Indonesia. Kota kecil yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga ini dijadikan markas militer sejumlah kesatuan. Komando Gabungan Wilayah (Kogabwilhan) I memindahkan markasnya ke Tanjungpinang sejak tahun 2020. Kogabwilhan merupakan institusi andalan TNI dalam mempertahankan wilayah perbatasan Indonesia. Didalamnya diisi personal TNI dari tiga matra, yaitu darat, laut dan udara. Komandan Kogabwilhan perwira bintang tiga. Selain Kogabwilhan I, sejak akhir Desember 2022 lalu, Koarmada I juga memindahkan markasnya dari Jakarta ke Tanjungpinang. Komandan Koarmada I

penyediaan air bersih di Kota Tanjungpinang di masa depan. Pemprov Kepulauan Riau dan Pemkot Tanjungpinang jangan hanya fokus menyiapkan lahan untuk markas militer, tapi juga mempertimbangkan penyediaan perumahan, air bersih, dan pelayanan publik lainnya. (Arman, 2022).

Sejauh ini kondisi soliditas TNI dan Polri di wilayah Tanjungpinang berjalan dengan baik. Belum pernah terdengar ada gesekan antar kesatuan personil TNI maupun antara TNI dengan Polri. Disisi lain, perpindahan Koarmada I ke Tanjungpinang juga berjalan dengan lancar. Personil Koarmada I yang baru datang bisa menempati rumah dinas, asrama dan fasilitas milik eks Lantamal IV Tanjungpinang. Sementara, fasilitas kantor dan asrama Kogabwilhan I di Dompak masih dalam tahap pembangunan. Beberapa tahun ke depan kawasan Dompak bakal bertambah ramai selain keberadaan kantor pemerintahan Pemprov Kepri, DPRD Kepri dan juga kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah).

IV. KESIMPULAN

perwira bintang dua. Selain Kogabwilhan dan Koarmada I, di Tanjungpinang sejak tahun 2006 juga sudah dibentuk Korem 033 Wira Pratama.

Dipilihnya Tanjungpinang sebagai markas beberapa institusi militer tidak terlepas dari posisi strategis Tanjungpinang di kawasan perbatasan. Wilayah perbatasan yang rawan konflik seperti Laut Natuna Utara (Laut China Selatan) menjadi perhatian utama dalam masalah keamanan Indonesia. Langkah strategis yang diambil TNI adalah menggeser pusat kekuatan militer yang selama ini terfokus di Jakarta ke wilayah perbatasan dan Tanjungpinang jadi pilihan.

Dalam sejarahnya, Tanjungpinang pasca kemerdekaan Indonesia sudah



dijadikan basis pertahanan Indonesia. Dimulai era pemberontakan PRRI di Sumatra Barat, Tanjungpinang menjadi basis Angkatan Udara yang berpusat di Lapangan Udara Kijang. Dari Tanjungpinang, pesawat tempur milik TNI AU bisa merebut pangkalan udara di Pekanbaru dan Padang. Tidak hanya basis AU, Angkatan Laut RI sejak tahun 1950 juga menjadikan Tanjungpinang sebagai basis militer mereka. Didirikan Komando Daerah Maritim Riau (KDMR) yang nantinya jadi cikal bakal lahirnya Lantamal IV Tanjungpinang.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arman, D. (2022). *Metamorfosa Tanjungpinang Jadi Basis Militer Daerah Perbatasan Indonesia*. Mediakepri.Com.
<https://mediakepri.co.id/2022/12/meta-morfosa-tanjungpinang-jadi-basis-militer-daerah-perbatasan-indonesia/>
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2015). *Citra Kota Tanjungpinang Dalam Arsip*. Jakarta: ANRI.
- Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Malik, A. et. a. (2022). *Kepulauan Riau dan Jejak Sejarahnya*. Tanjungpinang: CV Milaz Grafika.
- Mardamsyah, A., Wiranto, S., Sitorus, H., Hipdizah, H., Saptono, D., & Simatupang, H. (2022). Strategi Integrasi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Pada Operasi Militer Dalam Mendukung Kampanye Militer. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 9(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i9.1281>
- Sejarah Koarmada I*. (n.d.).
<https://koarmada1.tnial.mil.id/tentang-kami/sejarah>
- Sejarah Lantamal IV Tanjungpinang*. (2023). Lantamal IV Batam.

- <https://lantamal4-koarmada1.tnial.mil.id/sejarah/>
- Ulfah, Laeli Maria, A. S. (2021). Implementasi Kebijakan Penyebaran Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Guna Mendukung Sistem Pertahanan Negara. *Jurnal Manajemen Pertahanan*, 7(1).
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

